



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA PEMBUKAAN

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

Disampaikan Oleh:

Ir. Restu Ardi Daud, M.Sc

Deputi 3 Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Kementerian Dalam Negeri

Bangka Tengah, 5 April 2018



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA

2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



Tema RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas

5 Prioritas Nasional RKP 2019 → Tahun Terakhir Pelaksanaan NAWACITA

Tema RKPD Kep. Bangka Belitung 2019:
“Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”

Prioritas Daerah:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2. Pengembangan Pariwisata
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
5. Pembangunan Demokrasi

**APBD
TAHUN ANGGARAN
2019**



Indikator Makro Pembangunan Pusat – Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

Indikator Makro	Capaian Daerah Tahun 2017	Target Daerah dalam RPJMN 2019	Target Nasional dalam RKP 2019	Target Daerah dalam RKPD 2019
1	2	3	4	5
Tingkat Kemiskinan	5,30 %	2,7 – 3,0 %	8,5 – 9,5 %	4,15 %
IPM	69,92 %	-	71,98 %	-
Gini Ratio	0,28 %	-	0,38 – 0,39 %	-
Pertumbuhan Ekonomi	4,51 %	7,1 – 7,5 %	5,4 – 5,8 %	5,3 %
Pengangguran	3,78 %	2,7 – 2,9 %	4,8 – 5,2 %	5,6 %
Inflasi	3,13 %	-	2,5 – 4,5 %	6,1 %

Dapat dicermati dari angka pencapaian terhadap indikator makro diatas maka perlu upaya maksimal untuk mengejar target tersebut antara lain:

- ✓ Percepatan pembangunan infrastruktur*
- ✓ Penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia*
- ✓ Menjaga stabilitas harga bahan pokok*
- ✓ Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik*



BEBERAPA HAL STRATEGIS YANG PERLU MENJADI PERHATIAN DI TAHUN 2019



Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat



Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas



Mutu layanan dasar Kesehatan dan pendidikan



Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup



Kemandirian Pangan



Pengendalian Inflasi



Pengembangan Potensi Unggulan Daerah



Reformasi birokrasi dan Pemberantasan Korupsi



Tingkat Investasi



Pemilu Serentak (Pilpres dan Pemilu Legislatif)



UPAYA PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



1 Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah

- Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha
- Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih
- Pendirian dan optimalisasi peran koperasi

2 Kemandirian Pangan Rendah

- Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produksi pertanian dengan kualitas unggul
- Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal

3 Pengendalian Inflasi

- Membangun jaringan informasi agar dapat lebih cepat mengetahui perkembangan harga komoditas di pasar
- Menumbuhkan budaya organisasi yang lebih sigap terhadap segala perubahan harga

4 Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- Menentukan tempat yang strategis dalam pengembangan produk unggulan
- Secara aktif memperkenalkan produk daerah





5 Tingkat Investasi Rendah

- Meningkatkan tabungan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat

6 Potensi sumber daya di Kawasan Strategis belum terbangun dengan baik

- Meningkatkan produksi pengolahan potensi sumberdaya
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sumberdaya dikawasan strategis

7 Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas masih terbatas

- Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis
- Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi
- Pengembangan transportasi perkotaan untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif

8 Tingkat pendidikan SDM masih rendah

- Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya,
- Peningkatan kualitas SDM yang menguasai iptek yang berwawasan lingkungan
- Pengembangan pranata : kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM





9 Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas

- Meningkatkan kualitas karyawan yang produktif dalam menghadapi pelanggan
- Komitmen para pemimpin rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

10 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal

- Mewujudkan SDM yang berkompeten dan berintegritas tinggi
- Birokrasi efektif, efisien, dan adil
- Transparansi, akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

11 Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif

- Mensukseskan Pilpres dan Pemilu Legislatif dari segala aspek peserta pemilih, ASN sebagai peserta pelopor netralitas pemilu
- Meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif
- Meningkatkan hak politik masyarakat





12 Rehabilitas dan pengendalian lingkungan hidup

- Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup dengan berorientasi SDG's
- Melaksanakan pengendalian lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan dengan mempedomani RTRW

13 Penanggulangan bencana

- Membangun infrastruktur yang baik. Misalnya, membangun tanggul yang tinggi dan kokoh dan mendirikan bangunan tahan gempa.
- Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan melakukan penghijauan (reboisasi).





HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAKORTEK PEMBANGUNAN TAHUN 2018



**TOTAL USULAN
TAHUN 2019**



**Total Usulan
pada
Rakortek
Tahun 2018**

108.556

**Total Usulan yang
sudah
Dibahas/Disepakati
pada Rakortek
Tahun 2018**

18.430



Lanjutan

**KETERANGAN FORM KORTEKRENBANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018**

FORM 1a

- Usulan provinsi terhadap program/kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 204 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 86 Proyek;

FORM 1b

- proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 765 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 256 Proyek;

FORM 2

- usulan daerah untuk rancangan awal Renja K/L sebanyak 250 Proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 28 Proyek;

FORM 3

- Program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 488, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 103 Proyek;

FORM 4b

- Usulan provinsi dan kabupaten/kota terhadap proyek K/L yang mendukung target Pembangunan Nasional (diluar Prioritas Nasional) sebanyak 323, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 77 Proyek;

FORM 5

- Kontribusi program/kegiatan provinsi yang mendukung target pembangunan nasional (diluar Prioritas Nasional) Tahun 2019 sebanyak 161, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 1 Proyek;

FORM 6

- Kontribusi program/kegiatan kabupaten/ kota yang mendukung target Pembangunan Nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 497, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 36 Proyek.



PROYEK K/L Mendukung PN yang Berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



NO	OUTPUT KEGIATAN K/L
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS Yang Mendukung Ketahanan Pangan
2	Pembuatan Bangunan KTA Yang Mendukung Ketahanan Pangan (Dam Penahan dan Gully Plug)
3	Kebun Benih Semai / Kebun Benih Klon / Areal Sumber Daya Genetik
4	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan
5	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Udara
6	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil KP yang Dibangun dan Dimanfaatkan
7	Optimalisasi Reproduksi
8	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi
9	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya
10	Pembangunan Embung Pertanian
11	Pengembangan Sumber Air



RAKORTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 (YOGYAKARTA & MATARAM)



USULAN TAHUN 2018



Usulan provinsi yang mendukung PN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disetujui
→ **86 usulan**

Total usulan SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak **250 usulan**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal



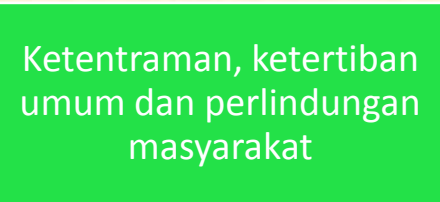
Pendidikan



Perumahan Rakyat &
Permukiman



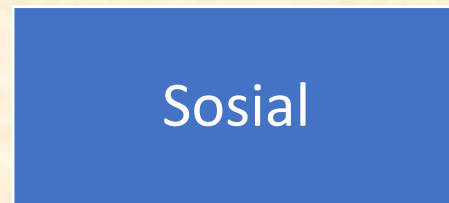
Kesehatan



Ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan
masyarakat



Pekerjaan Umum
& Penataan Ruang



Sosial

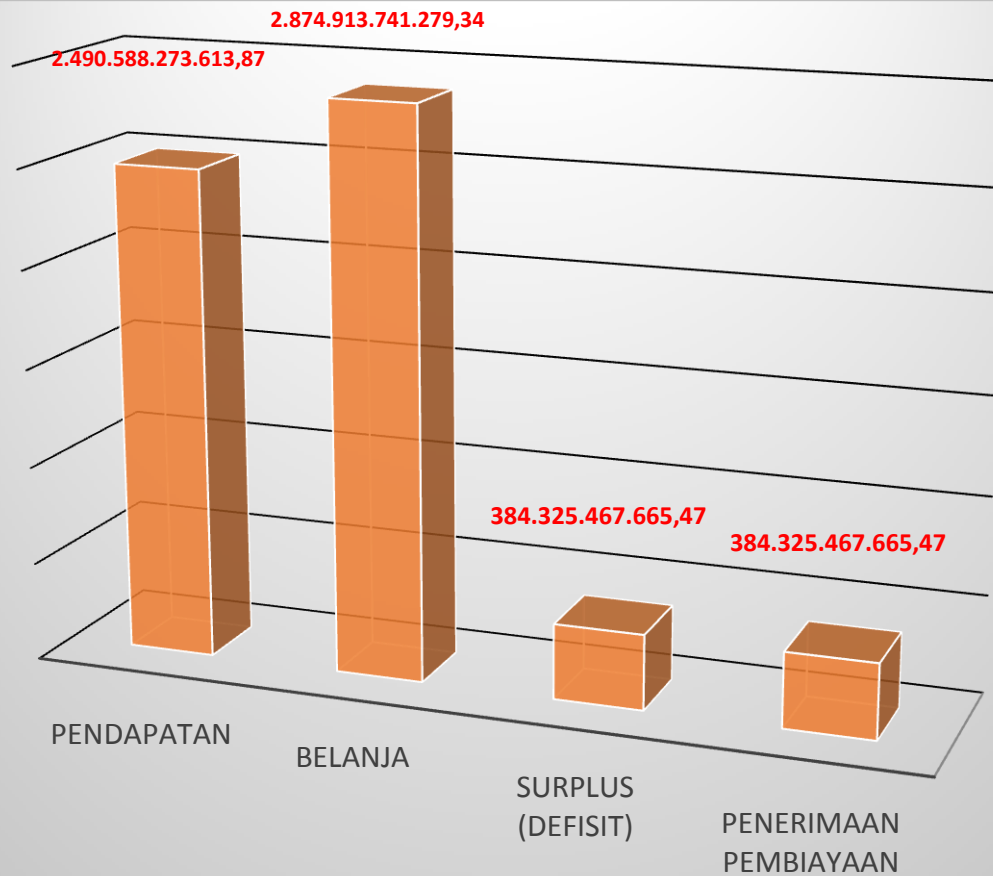


Dengan telah diterbitkannya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal maka didalam RKPD perlu mengakomodir pemenuhan terhadap 6 SPM.



POSTUR APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA 2018

Perda No. 15 Tahun 2017,
Tanggal 28 Desember 2017

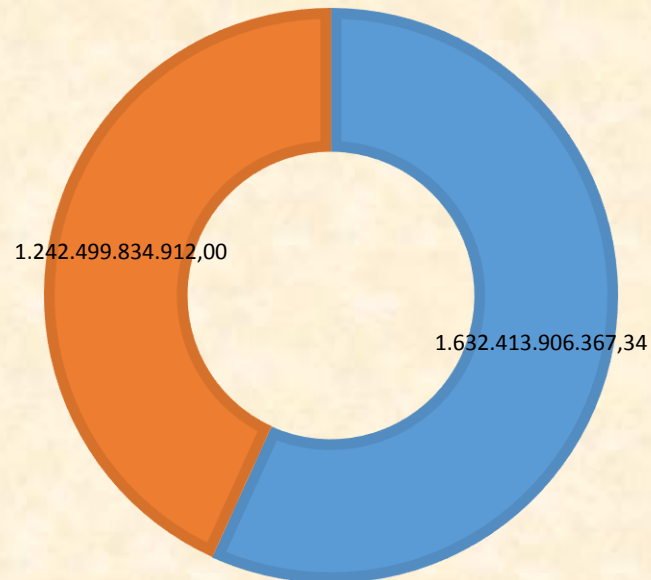


■ Sumber Data: Perda APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018



TOTAL BELANJA: 2.874.913.741.279,34

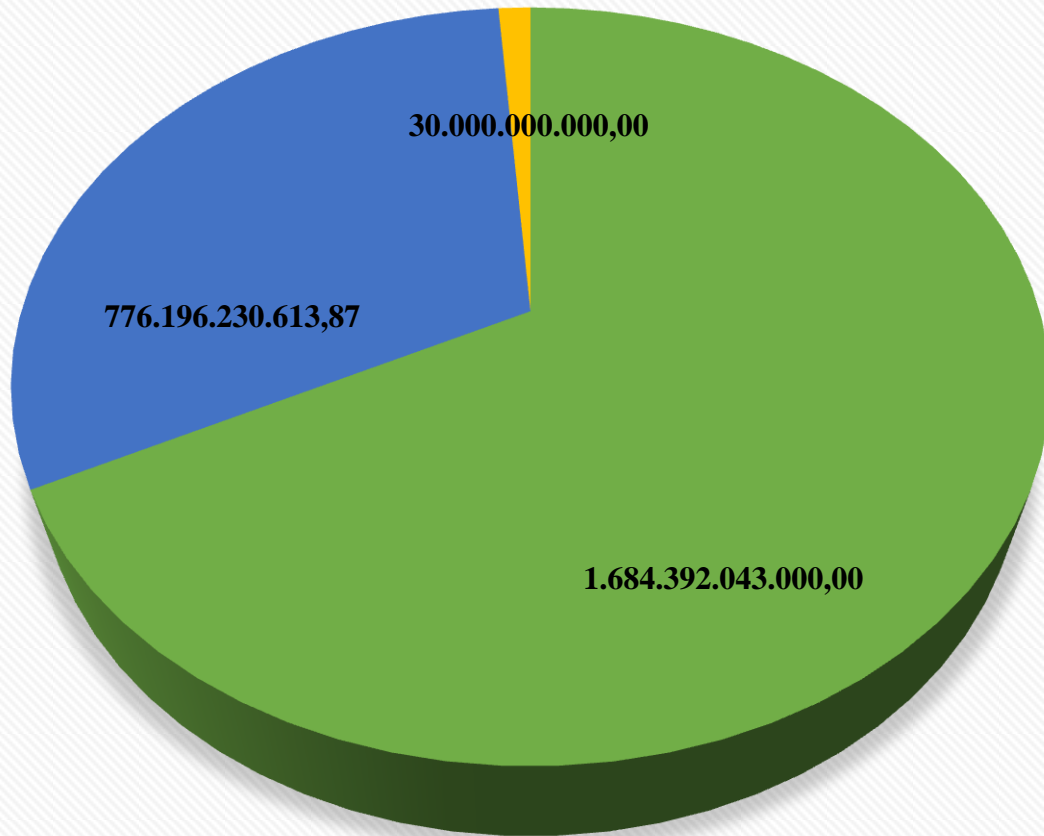
■ Belanja Tidak Langsung ■ Belanja Langsung



Sumber : Perda APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung

- Semakin besar belanja langsung maka semakin besar manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat karena menjadi penggerak dan pendorong perkembangan daerah
- Belanja harus diarahkan lebih banyak kepada belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau belanja publik (Belanja Langsung)



■ Dana Perimbangan ■ Pendapatan Asli Daerah ■ Lain-Lain PD Yang Sah

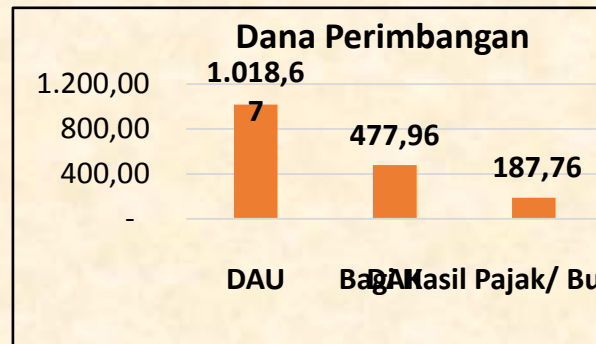
Dana Perimbangan > PAD

- PAD harus menjadi bagian sumber dana terbesar dan dominan → Daerah sebagai Otonom/ kemandirian daerah
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu mengolah potensi SDA dan SDM untuk mendukung pembangunan dalam meningkatkan PAD.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah sehingga pada akhirnya ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi



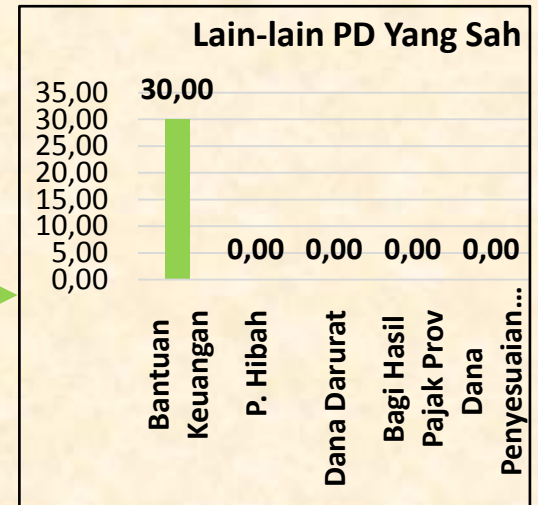
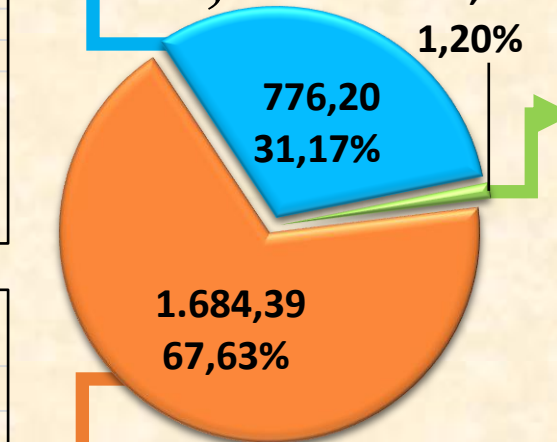
PENDAPATAN APBD PROVINSI BANGKA BELITUNG TA 2018

miliar
rupiah



Total Pendapatan:

2,490.59



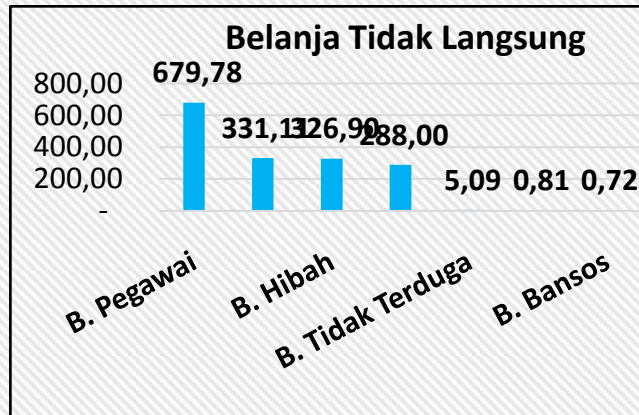
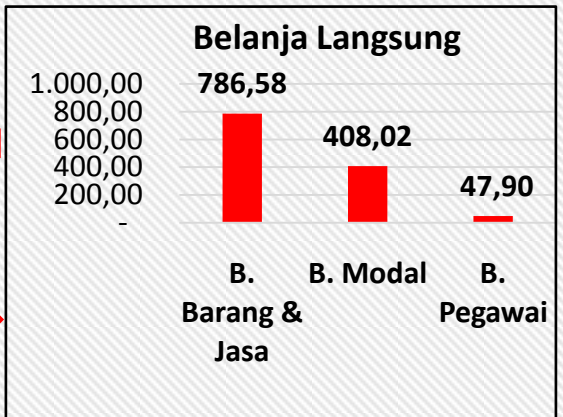
■ Dana Perimbangan



BELANJA APBD PROVINSI BANGKA BELITUNG TA 2018

miliar
rupiah

Total Belanja: 2,874.91



**1.632,41
56,78%**

**1.242,50
43,22%**

■ **Belanja Tidak Langsung**



100 KAB/KOTA UTAMA UNTUK INTERVENSI STUNTING


1 KAB. ACEH TENGAH	26 KAB. CIREBON	51 KAB. BANGKALAN	76 KAB. KETAPANG
2 KAB. PIDIE	27 KAB. SUMEDANG	52 KAB. SAMPANG	77 KAB. BARITO TIMUR
3 KAB. LANGKAT	28 KAB. INDRAMAYU	53 KAB. PAMEKASAN	78 KAB. HULU SUNGAI UTARA
4 KAB. PADANG LAWAS	29 KAB. SUBANG	54 KAB. SUMENEP	79 KAB. PENAJAM PASER UTARA
5 KAB. NIAS UTARA	30 KAB. KARAWANG	55 KAB. PANDEGLANG	80 KAB. MALINAU
6 KOTA GUNUNGSITOLI	31 KAB. ...		81 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
7 KAB. PASAMAN	32 KAB. ...		82 KAB. BANGGAI
8 KAB. PASAMAN BARAT	33 KAB. ...		83 KAB. ENREKANG
9 KAB. ROKAN HULU	34 KAB. ...		84 KAB. BUTON
10 KAB. KERINCI	35 KAB. ...		85 KAB. BOALEMO
11 KAB. OGANKOMERING ILIR	36 KAB. ...		86 KAB. GORONTALO
12 KAB. K A U R	37 KAB. ...		87 KAB. MAJENE
13 KAB. LAMPUNG SELATAN	38 KAB. ...		88 KAB. POLEWALI MANDAR
14 KAB. LAMPUNG TIMUR	39 KAB. BLORA	64 KAB. SUMBA TIMUR	89 KAB. MAMUJU
15 KAB. LAMPUNG TENGAH	40 KAB. ...	65 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	90 KAB. MALUKU TENGAH
16 KAB. BANGKA BARAT	41 KAB. PEMALANG	66 KAB. TIMOR TENGAH UTARA	91 KAB. SERAM BAGIAN BARAT
17 KAB. NATUNA	42 KAB. BREBES	67 KAB. A L O R	92 KAB. HALMAHERA SELATAN
18 KEPULAUAN SERIBU	43 KAB. KULON PROGO	68 KAB. LEMBATA	93 KAB. SORONG SELATAN
19 KAB. BOGOR	44 KAB. TRENGGALEK	69 KAB. NGADA	94 KAB. TAMBRAUW
20 KAB. SUKABUMI	45 KAB. MALANG	70 KAB. MANGGARAI	95 KAB. JAYAWIJAYA
21 KAB. CIANJUR	46 KAB. JEMBER	71 KAB. ROTE NDAO	96 KAB. TOLIKARA
22 KAB. BANDUNG	47 KAB. BONDOWOSO	72 KAB. SUMBA TENGAH	97 KAB. NDUGA
23 KAB. GARUT	48 KAB. PROBOLINGGO	73 KAB. SUMBA BARAT DAYA	98 KAB. LANNY JAYA
24 KAB. TASIKMALAYA	49 KAB. NGANJUK	74 KAB. MANGGARAI TIMUR	99 KAB. DOGIYAI
25 KAB. KUNINGAN	50 KAB. LAMONGAN	75 KAB. SABU RAIJUA	100 KAB. INTAN JAYA

*Jumlah Balita Stunting
sebanyak 8.902 jiwa di
Kab. Bangka Barat*

ALTERNATIF PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



• Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*;



• Melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten dan Kota → *review* dan pendampingan penyusunan (baru);



• Sinkronisasi RKPD 2019 → *review* dan pendampingan penyusunan;



• Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 100 daerah intervensi *stunting* untuk mendapatkan NIK dan AKTE;



• Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah



• Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran



Pengembangan Smart City "Kota Cerdas"



SEBAGAI PENGENDALI (BUFFER) ARUS URBANISASI DAN DIARAHKAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN UTAMA YANG MENDORONG KETERKAITAN KOTA DAN DESA DI WILAYAH SEKITARNYA

- Kota Pangkalpinang
- Kab. Bangka



**MENGEMBANGKAN
SISTIM TRANSPORTASI**



**MENINGKATKAN
SARANA PEREKONOMIAN**



**MENINGKATKAN
KEAMANAN KOTA**



**MENINGKATKAN
PELAYANAN**



**MENINGKATKAN
SARANA PERMUKIMAN**



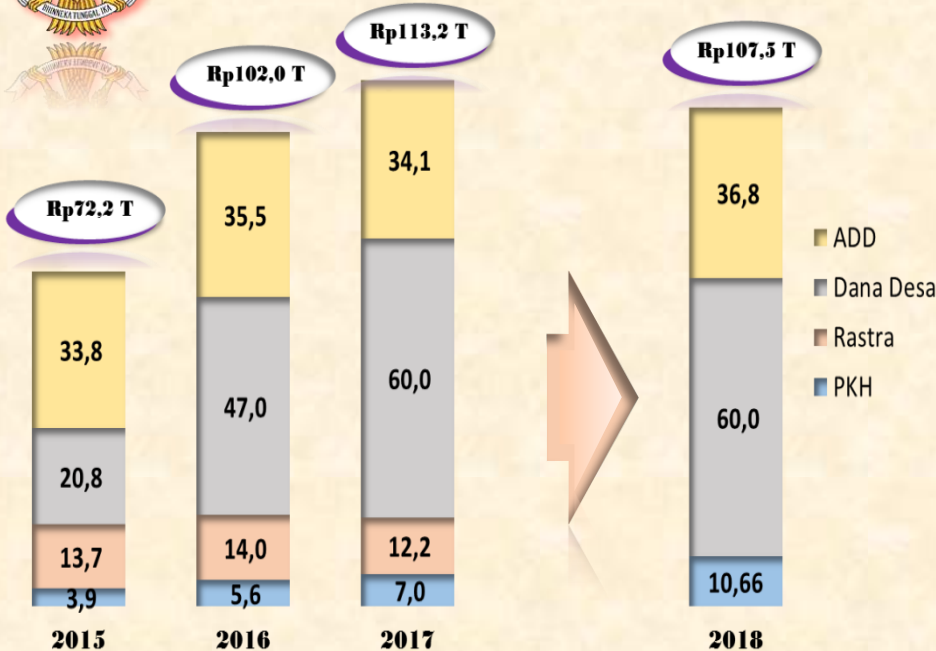
**PENYEDIAAN
SARANA PRASARANA**



DILAKUKAN MELALUI



Pendanaan Desa dan Kemiskinan



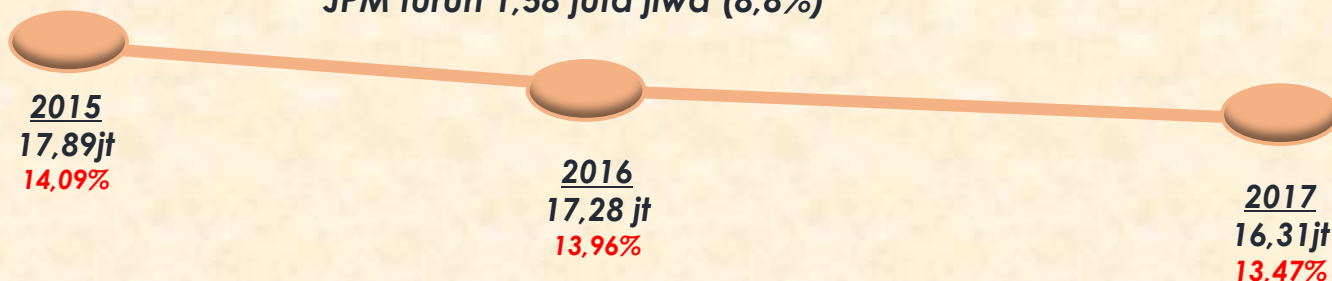
- Periode 2015-2017, Dana yang ke Desa mencapai Rp287,44 T
- Tahun 2018 Anggaran ke desa Rp107,46T

Pemanfaatan dana desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 sebanyak 264,6 M untuk 309 desa



Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Perdesaan

JPM turun 1,58 juta jiwa (8,8%)



Pemanfaatan Dana Desa melalui skema Cash for Work dapat menjadi solusi untuk mempercepat : penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sekaligus menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan antardesa



PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK TA 2015-2018



KINERJA PENGGUNAAN 2015

Pembangunan Rp14,21 T (82,21%)

Pemberdayaan Masyarakat Rp1,37 T (7,7%)

Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,13 T (6,55%)

Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,61 T (3,51%)

KINERJA PENGGUNAAN 2016

Pembangunan Rp40,54 T (87,7%)

Pemberdayaan Masyarakat Rp3,17 T (6,8%)

Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,68 T (3,6%)

Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,84 T (1,8%)

Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa (triliun rupiah)

KOMPONEN	2015	2016	2017	2018
	APBN	APBN	APBN	APBN
Pagu Dana Desa	20,77	46,98	60,00	60,00
Anggaran Infrastruktur Publik melalui Dana Desa	17,07	41,20	52,62	52,62
%	82,20%	87,70%	87,70%	87,70%

ASUMSI :

- Tahun 2015-2016 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa
- Tahun 2017-2018 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa tahun 2016

Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa 2017 berdasarkan Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 (34,93 Trilyun)

Sebanyak 75,77% Dana Desa Tahun 2017 masih didominasi untuk mendukung pembangunan sarana prasarana desa



No	Bidang	Anggaran	(%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2.663.508.353.886	7,62%
2	Sarana Prasarana Desa	26.468.132.944.629	75,77%
3	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	1.152.815.134.877	3,30%
4	Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan	166.180.880.132	0,48%
5	Pemberdayaan Masyarakat	3.258.589.305.250	9,33%
6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	728.931.606.725	2,09%
7	Pembinaan Kemasyarakatan	496.330.108.746	1,42%
TOTAL		34.934.488.334.245	100,00%

Sumber dari web: sipede.pppmd.kemendes.go.id Rekap 28 Desember 2017

DANA DESA T.A 2018

1 Kab. Bangka	51.813.670
2 Kab. Belitung	38.742.236
3 Kota Pangkal Pinang	0
4 Kab. Bangka Selatan	42.476.581
5 Kab. Bangka Tengah	47.422.068
6 Kab. Bangka Barat	48.509.328
7 Kab. Belitung Timur	35.607.842
Total se-Babel	264.571.725



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



HASIL PEMANFAATAN DANA DESA TA 2015-2017

Berdasarkan hasil evaluasi dalam tiga tahun terakhir, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa



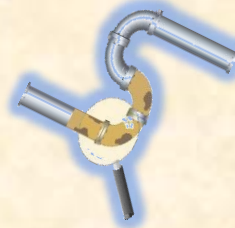
Jalan Desa

2015: 22,9 ribu km
2016: 66,9 ribu km
2017: 109,3 ribu km



Jembatan

2015: 234,4 km
2016: 511,9 km
2017: 852,2 km



Sambungan Air Bersih

2015: 5.831 Unit
2016: 16.295 Unit
2017: 303.473 Unit



Embung Desa

2015: 255 Unit
2016: 686 Unit
2017: 3.715 Unit



Posyandu
2015: 2.417 Unit
2016: 7.524 Unit
2017: 38.330 Unit

Posyandu

2015: 2.417 Unit
2016: 7.524 Unit
2017: 38.330 Unit



Pasar Desa

2015: 1.181 Unit
2016: 1.819 Unit
2017: 16.794 Unit

2015: 1.181 Unit
2016: 1.819 Unit
2017: 16.794 Unit



PAUD Desa

2015: 3.005 Unit
2016: 11.926 Unit
2017: 28.792 Unit

2015: 3.005 Unit
2016: 11.926 Unit
2017: 28.792 Unit



SUMUR DAN MCK

2015: 26.704 Unit
2016: 51.402 Unit
2017: 264.031 Unit

2015: 26.704 Unit
2016: 51.402 Unit
2017: 264.031 Unit



DRAINASE DAN IRIGASI

2015: 37.832 Unit
2016: 78.594 Unit
2017: 182.919 Unit

2015: 37.832 Unit
2016: 78.594 Unit
2017: 182.919 Unit



PADAT KARYA TUNAI DESA



Arahan Bapak Presiden

- ***PADAT KARYA TUNAI DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP SWAKELOLA***
- ***DITUJUKAN MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DESA YANG SECARA EKONOMI MASUK DALAM KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN***



SKB 4 Menteri

- ***NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017; 954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA***



SIMULASI PADAT KARYA

SKENARIO PADAT KARYA	NILAI DANA DESA	JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT KARYA 2 BULAN	JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT KARYA 3 BULAN
20% Dana Desa	12 T	2,250,000	1.500.000
30% Dana Desa	18 T	3,375,000	2.250.000
40% Dana Desa	24 T	4,500,000	3.000.000
50% Dana Desa	30 T	5,625,000	3.750.000
60% Dana Desa	36 T	6,750,000	4.500.000
70% Dana Desa	42 T	7,875,000	5.250.000
80% Dana Desa	48 T	9,000,000	6.000.000

1. Berdasarkan simulasi padat karya Dana Desa 2018 diketahui, bahwa estimasi penggunaan 20% Dana Desa untuk kegiatan padat karya selama 2 bulan akan menyerap 2.250.000 tenaga kerja, sedangkan untuk waktu kerja 3 bulan akan menyerap 1,5 juta tenaga kerja.

2. Untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja padat karya sebanyak 14 juta orang dibutuhkan alokasi anggaran sebesar 140% Dana Desa tahun 2018 atau sebesar Rp. 84 T

Asumsi:

- harga pasar untuk upah tukang per hari Rp 80.000.-
- Upah tukang untuk padat karya 80%. yaitu Rp 64.000.-
- Upah kerja padat karya 2 bulan Rp 3.200.000.-
- Upah kerja padat karya 3 bulan Rp 4.800.000.-



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PERAN KEMENDAGRI

Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Daerah dan Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:

- Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- Penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
- Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengawal pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.



PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

DAYA SAING INDONESIA DALAM PERSAINGAN GLOBAL (TAHUN 2017-2018)

Diukur dari Kelembagaan, Infrastruktur, Lingkungan Makro Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2017-2018

NO	NEGARA	PERINGKAT DAYA SAING DARI 137 NEGARA	
		RANKING	SCORE
1	SINGAPURA	3	5,7
2	MALAYSIA	23	5,2
3	THAILAND	32	4,7
4	INDONESIA	36	4,7
5	BRUNAI DARUSSALAM	46	4,5
6	VIETNAM	55	4,4
7	PHILIPINA	56	4,4
8	KAMBOJA	94	3,9
9	LAOS	98	3,9
10	TIMOR LESTE	-	
11	MYANMAR	-	

sumber : *The Gobar Competitiveness Report 2017-2018, World Economi Forum* diolah

INVESTASI

MOMENTUM KEPERCAYAAN INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA, ANTARA LAIN:

1. **LAYAK INVESTASI** DARI FITCH RATING SCALE, MOODY'S RATING, DAN STANDARD AND POOR'S (S&P) GLOBAL RATING AGENCY
2. PENINGKATAN **PERINGKAT** INDONESIA SBG **TUJUAN INVESTASI** DARI POSISI NOMOR 8 MENJADI **NOMOR 4**
3. **PERINGKAT I** NEGARA YG **PEMERINTAHANNYA DIPERCAYA** MASYARAKAT (80%) HASIL SURVEY GALLUP WORLD POOL. SURVEY GWP TERSEBUT MERUPAKAN SURVEY YG BERKELAS DAN BUKAN SURVEY BIASA;
4. **RENDAHNYA NILAI INFLASI** MERUPAKAN MOMENTUM DALAM NEGERI. PD TAHUN 2015 DAN 2016 INDONESIA MEMILIKI INFLASI YG RENDAH YAITU DIBAWAH 4%. MOMENTUM TERSEBUT JGN SAMPE TDK DIMANFAATKAN, DIBIARKAN LEWAT DAN DISIA-SIAKAN;
5. **PENURUNAN BANK INDONESIA (BI) 7 DAYS (RESERVE) REPO RATE** MENJADI 4,5 %
6. **PERINGKAT EASE OF DOING BUSINESS (EoDB)** INDONESIA DARI 120 MENJADI 106 DAN TERAKHIR BERADA PADA PERINGKAT 91. HAL TERSEBUT MENJADI LONCATAN KEPERCAYAAN INTERNASIONAL TERHADAP INDONESIA.



**MOMENTUM INI
DAPAT
MENGGERAKKAN
INVESTASI**



**KUNCI
PERTUMBUHAN
EKONOMI**

1

**MENGURANGI
KENSENJANGAN**

4

INVESTASI

2

**MENCIPTAKAN
LAPANGAN
PEKERJAAN**

3

**MENINGKATAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT**



PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ketidaktegasan batas daerah:

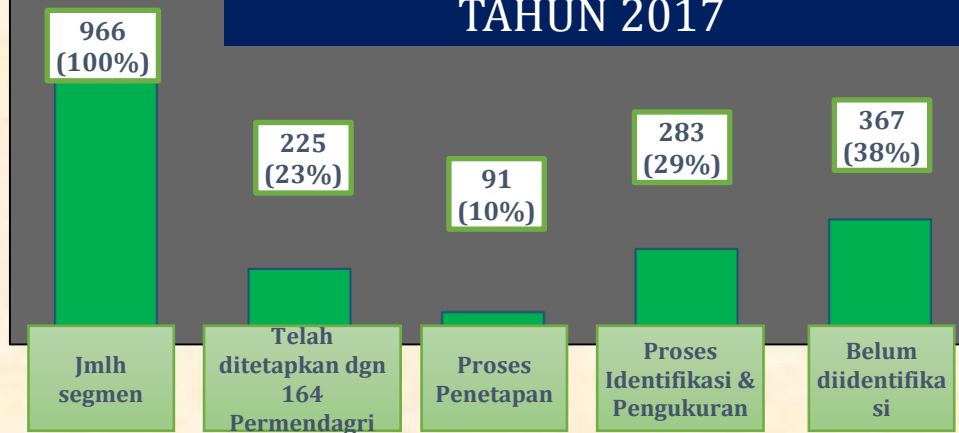
- Memicu munculnya perselisihan antar daerah karena perebutan sumber daya baik SDA maupun potensi ekonomi wilayah.
- Menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- Ketidakjelasan tanggung jawab atas pelayanan publik

Permasalahan penegasan 966 Total segmen batas daerah seluruh Indonesia



Pemekaran dan ketidaksinkronan Undang-Undang Pembentukan Daerah

REALISASI PENEGASAN BATAS S.D. TAHUN 2017



Penyelesaian Permasalahan

Permasalahan pada perbatasan

- Permasalahan sengketa batas wilayah antara Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan Provinsi Kep. Riau terkait dengan posisi Pulau Tujuh.
- Permasalahan sengketa batas wilayah antara Kab. Bangka dengan Kota Pangkalpinang, serta Kab. Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang.
- Penguatan pertahanan dan batas negara di wilayah perbatasan.
- Perlunya perlindungan hukum terhadap gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Tingkatkan koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan.



PENGALOKASIAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM APBD



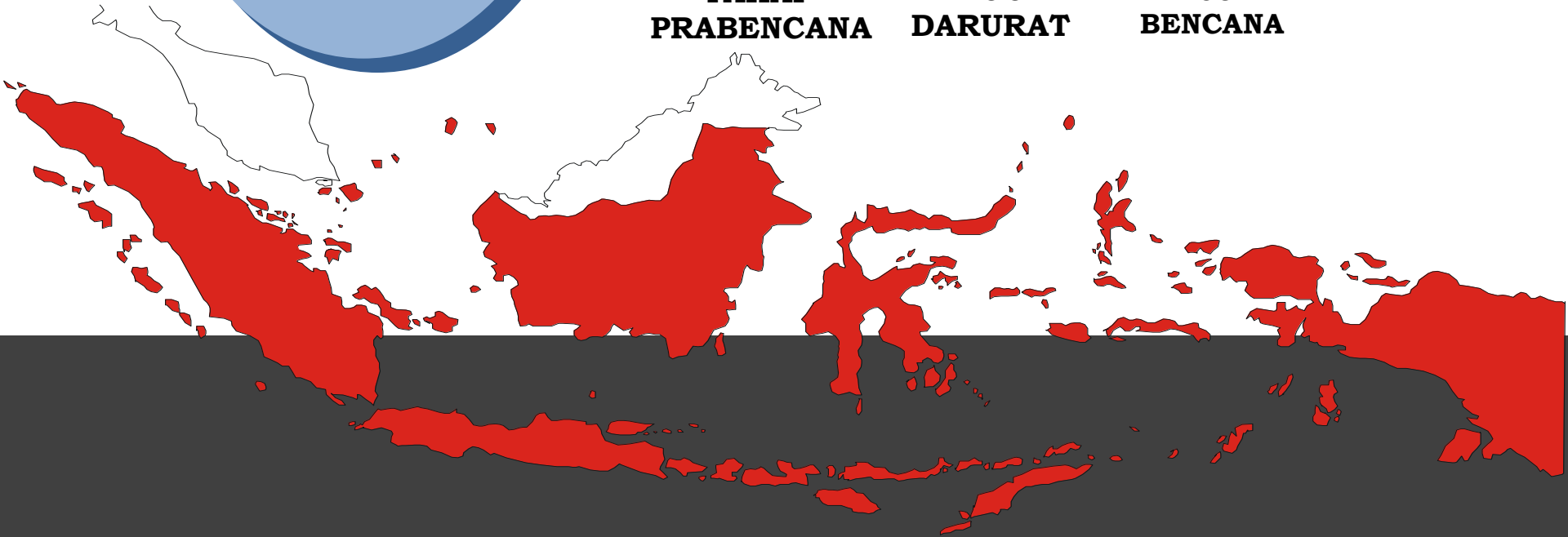
**TAHAP
PRABENCANA**



**TANGGAP
DARURAT**



**PASCA
BENCANA**





HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019 (Sesuai dengan Permendagri Tentang RKPD 2019)



1. Arah Kebijakan Nasional

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.**
- 2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019; dan Tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.**
- 3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,68 persen, Jawa 58,18 persen, Kalimantan 8,23 persen, Sulawesi 6,26 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,18 persen, Maluku 0,54 persen Papua 1,94 persen.**

2. Prioritas Nasional (PN)

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;**
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;**
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;**
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan**
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.**

3. Program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah

- 4. Memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; trantibum & linmas; dan sosial**



TERIMA KASIH